

MAMPU

KITA

KABAR DARI KITA

KABAR DWI BULANAN PROGRAM MAMPU

EDISI 12/2019 | NOV-DES



Mengusung tema “Perempuan Mampu, Indonesia Maju”, Konferensi Nasional Sinergi Multipihak untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempertemukan lebih dari 200 pemangku kepentingan dari berbagai sektor dan wilayah untuk mendiskusikan isu dan solusi terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama BAPPENAS, Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djokokusumo, MSc., membuka secara resmi konferensi pada 27 November 2019 lalu di Jakarta, yang terselenggara atas kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui Program MAMPU.

Konferensi ini bertujuan untuk membangun sinergi dan hubungan positif antara masyarakat sipil, anggota DPR-RI/DPD, pemerintah pusat/daerah, pihak swasta dan media dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia, khususnya perempuan.

Dalam pidato pembukaannya, Dr. Himawan mengatakan, “Strategi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, melakukan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan perempuan memperoleh akses dan manfaat, serta berpartisipasi dan memiliki kontrol terhadap pembangunan. Strategi tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan mengusung semangat ‘no one left behind’, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu amanat dalam Perpres tersebut adalah pelibatan aktor non-pemerintah seperti organisasi filantropi, pelaku usaha, akademisi dan organisasi kemasyarakatan”.

Konferensi yang berlangsung satu hari penuh ini mendiskusikan empat tema sentral, yakni 1) Akses Perempuan dan Cakupan

Program Perlindungan Sosial dan Kesehatan Reproduksi; 2) Perempuan dan Politik; 3) Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan; dan 4) Perempuan dalam Dunia Kerja. Perwakilan organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, lembaga pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi dan media terlibat dalam diskusi-diskusi yang dirangkul menjadi sejumlah rekomendasi sinergi multipihak dalam menyoroti ketimpangan dan persoalan yang terdapat di masing-masing tema.

Duta Besar Australia untuk Perempuan dan Remaja Putri, Dr Sharman Stone, yang ikut membuka konferensi mengatakan, “Saya sangat bersemangat untuk datang kembali ke Indonesia dan bertemu dengan para pemimpin perempuan, pembuat kebijakan,

pengusaha dan aktivis masyarakat sipil yang bekerja untuk memajukan kesetaraan gender di Indonesia. Australia bangga dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi perempuan dan remaja putri, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi dan standar kehidupan yang lebih baik bagi semua.”

Konferensi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, diantaranya: 1) Memperkuat akses dan kesempatan perempuan, khususnya perempuan miskin, sebagai aktor perubahan untuk pembangunan yang berkesetaraan gender; 2) Mendorong kerja sama dan sinergi dengan Kaukus Perempuan Parlemen dan organisasi lain, seperti mitra Program MAMPU untuk mengatasi isu-isu prioritas perempuan; 3) Mendorong upaya perlindungan dan pemberdayaan inovatif berbasis IT bagi perempuan pekerja informal dan pekerja migran, dengan memanfaatkan good practices, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; 4) Harmonisasi regulasi nasional dan daerah, terutama karena masih banyak regulasi diskriminatif, yang berdampak pada diskriminasi perempuan dan anak. Terdapat 333 Perda dari 381 perda diskriminatif yang langsung menyoroti pada diskriminasi terhadap perempuan.

Rayakan Hari Pergerakan Perempuan: Forum Pengada Layanan, Komnas Perempuan, dan KPPPA Tandatangan MoU Keterpaduan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Forum Pengada Layanan (FPL) bagi perempuan korban kekerasan bersama Komnas Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Keterpaduan dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan untuk pemenuhan Hak Asasi Perempuan di Semarang (21/12). Penandatanganan ini bagian dari kegiatan Ekshibisi Karya Perempuan Indonesia (EKS-POSE) dalam perayaan Hari Ibu yang dilaksanakan oleh Dinas PPPA Semarang. MoU ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya data yang komprehensif dan laporan bersama setiap tahun yang menggambarkan situasi penanganan kasus perempuan korban kekerasan dari berbagai aspek untuk kepentingan pemajuan hak asasi perempuan Indonesia.

"FPL sangat mengapresiasi komitmen Dinas PPPA dan Komnas Perempuan untuk bekerjasama melalui MoU ini agar dapat

menyelaraskan tugas, fungsi, dan sumber daya di Lembaga Negara, Institusi Penegakan Hak Asasi Perempuan dan Lembaga Layanan dalam mewujudkan keterpaduan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia", ungkap Veni Siregar, Seknas FPL.

Selain mewujudkan hak konstitusional perempuan yang dijamin dalam Pasal 28 D (1) UUD 1945, MoU ini juga memastikan komitmen Indonesia untuk secara konsisten melaksanakan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Aksi Kolektif Mitra MAMPU Dukung Penggiatan HKSR & Pencegahan Perkawinan Anak di Kalangan Anak Muda Lewat Youth Health Awards 2019

Sepanjang November – Desember lalu, Program MAMPU memberikan dukungan kepada Mitra MAMPU terpilih di 3 provinsi yang fokus pada isu kesehatan dan gizi remaja, khususnya remaja perempuan. Setelah melalui proses seleksi yang menyeluruh, 3 proyek terapan terbaik di Aceh, Yogyakarta, dan Jawa Timur terpilih untuk memperoleh dukungan dana dan teknis.

Aceh Educamp 2019, yang digagas oleh Bayu Satria dari Forum Anak Kota Sabang, didampingi Flower Aceh, submitra Program MAMPU dampingan PERMAMPU, melibatkan 20 remaja usia 15 – 22 tahun dari 9 kabupaten/kota di Aceh. Rangkaian kegiatan diselenggarakan selama 3 hari di Kota Sabang dimana peserta mengikuti beragam sesi menarik dan menyenangkan seputar kesetaraan gender,

menghadapi dan menghargai perbedaan, membuat konten bermuatan positif dan edukatif di media sosial, dan tentunya, berbicara mengenai hal-hal yang dianggap tabu seputar HKSR dan kaitannya dengan stunting.

Dalam salah satu sesi permainan dan pemaparan bersama Suraiya Kamaruzzaman, pendiri Flower Aceh dan aktivis perempuan, mengatakan para peserta belajar berbicara untuk memberikan pengaruh. "Saya mengajak peserta untuk membangun strategi advokasi HKSR melalui persuasive speaking. Suara anak muda wajib didengar." Di akhir acara, peserta berbagi peran dalam menyampaikan aspirasi yang sudah mereka siapkan selama pembekalan 2 hari sebelumnya melalui dialog bersama Kepala

Desa, serta perwakilan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

Di Yogyakarta, Rumah Sehati yang didampingi oleh Mitra MAMPU 'Aisyiyah bekerja sama dengan Ikatan

Pelajar Muhammadiyah menyediakan layanan kesehatan seksual dan reproduksi melalui kegiatan roadshow ke salah satu sekolah menengah atas. Ahimsa Wardah, Koordinator Rumah Sehati menyatakan, "Meskipun Yogyakarta memiliki julukan kota pelajar, akan tetapi masih banyak remaja yang belum berani mengakses layanan kesehatan reproduksi. Tingginya angka Kehamilan Tak Diinginkan (KTD) dari tahun ke tahun membuktikan bahwa remaja masih membutuhkan layanan yang lebih dekat dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu di sinilah pentingnya menghadirkan layanan kesehatan reproduksi yang bebas stigma bagi remaja."

Kegiatan yang berlangsung di SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta ini diikuti oleh sekitar 300 pelajar perempuan dan laki-laki. Rangkaian kegiatan terdiri dari talkshow "Dari Tabu Menjadi Tahu", pemeriksaan sel darah (HB), pengukuran Indeks Massa Tubuh, konseling kesehatan reproduksi dan psikologi, pemberian makanan tambahan, nonton bareng film "Masa Sih?", serta beragam games edukatif. Pada puncak acara, pihak penyelenggara memberikan penghargaan kepada SMK 4 Muhammadiyah sebagai Sekolah Sadar Kespro, atas dukungan dan partisipasi aktifnya dalam memberikan akses pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi kepada murid.





Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur, Laskar Remaja Ponorogo, yang merupakan dampingan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), fokus pada upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berlangsung selama 2 minggu, proyek terapan bertema "Bersama Menginspirasi", terdiri dari 3 kegiatan utama: Seminar Hak Kesehatan Reproduksi yang dilaksanakan secara serentak di 3 Sekolah (SMPN 2 Ngrayun, SMPN 2 Sooko, SMPN 1 Puduk) 2 November 2019 lalu, Kompetisi Film Pendek dengan tema: "Remaja Melek Kesehatan Seksual dan Reproduksi", dan Dialog

Inspiratif: "Membangkitkan Semangat Pemuda Ponorogo dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak Perempuan dan Perwakilan Anak".

Acara puncak Dialog Inspiratif (23/11) dihadiri oleh lebih kurang 80 peserta, dan dibuka oleh Kepala Bidang PPPA Kab. Ponorogo dengan pemateri yang berasal dari Paguyuban Anak Ponorogo, Forum for Indonesia Chapter Ponorogo, dan Duta Genre Kab. Ponorogo 2019. "Kegiatan ini bertujuan berbagi pemahaman tidak hanya kepada remaja, tetapi juga kepada orang tua dan guru mengenai pentingnya menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Terutama terkait kesehatan seksual reproduksi yang komprehensif," pungkask Rhoudatul Esa, ketua pelaksana kegiatan.

Swara Parangpuan, Cegah dan Tangani Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Desa

Swara Parangpuan Sulut bersama Forum Pengada Layanan (FPL) melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan bagi perempuan miskin korban kekerasan di Minahasa, Sulawesi Utara. Salah satu cara yang dikembangkan adalah mendekatkan akses layanan bagi perempuan korban kekerasan di tingkat desa melalui pengembangan layanan berbasis komunitas (LBK) di 5 desa dampingan. Melalui LBK, Swara Parangpuan menumbuhkan semangat, empati, kerja sama dan kepedulian dari beragam pemangku kepentingan terhadap permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender.

Sejak 2 tahun terakhir, 5 LBK ini terlibat aktif dalam mengadvokasi RKPDes di desa dampingan. Usulan mereka belum menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa, sehingga Swara Parangpuan merasa perlu menyelenggarakan pelatihan 'Penyusunan Kegiatan dan Alokasi Anggaran Pencegahan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam RKP Desa' yang bertujuan untuk mendorong lahirnya dokumen

perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada perempuan dan anak korban kekerasan.

Pelatihan yang dilaksanakan pada 2-3 Desember 2019 di Kota Manado ini dihadiri oleh 15 peserta yang berasal dari 5 perwakilan dari Pemerintah Desa (Kepala Desa atau Sekretaris Desa), 5 perwakilan 5 LBK dampingan Swara Parangpuan, dan 5 staf Program Swara Parangpuan Sulut.

Hasil dari pelatihan ini adalah usulan kegiatan dan alokasi anggaran tentang pencegahan, penanganan, pemberdayaan, pembentukan kelembagaan, dan penguatan komunitas LBK dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 di 5 desa dampingan Swara Parangpuan. Selain itu disepakati juga rencana bersama antar LBK dan Pemerintah Desa agar usulan kegiatan dan alokasi anggaran ini masuk dan menjadi kegiatan prioritas atau kegiatan unggulan pada RPK Desa Tahun 2021 di 5 desa dampingan Swara Parangpuan.

Dukung Keberlanjutan Program, MAMPU Laksanakan Pitching Training dan DEVI Speed Date: Data for Empowerment

MAMPU bekerjasama dengan Saraswati laksanakan Pitching Training dan DEVI Speed Date dengan tema "Data for Empowerment". DEVI Speed Date adalah ajang pertemuan antara Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mitra MAMPU maupun komunitas lainnya yang bergerak dalam isu pemberdayaan perempuan dengan pihak swasta, media, lembaga riset, maupun penggiat data, teknologi, dan desain yang bekerja mengolah data untuk pengambilan keputusan, khususnya terkait isu perempuan.

Bekerja sama dengan Tempo Institute, DEVI Speed Date: Data for Empowerment menjadi bagian dari Tempo Media Week 2019 yang berlangsung di Perpustakaan Nasional pada Sabtu, 7 Desember 2019. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program Sustainability Pathways MAMPU untuk mendukung LSM mitra MAMPU dalam mengembangkan strategi keberlanjutan organisasi. Sehari sebelum DEVI Speed Date, OMS mitra MAMPU mengikuti "Pitching Training" guna mempersiapkan mereka dalam mempromosikan lembaga dan kegiatan lembaga masing-masing secara menarik dan efektif.

DEVI (www.devi.id) adalah sebuah platform berjejaring sosial yang dikembangkan oleh Saraswati yang bertujuan untuk menghubungkan aktor-aktor yang bergerak di bidang pembangunan untuk saling bertemu, berbagi informasi, dan berkolaborasi untuk menghasilkan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat. DEVI Speed Date merupakan acara rutin yang diadakan untuk memperkenalkan anggota DEVI dengan lembaga dan individu-individu yang aktif dalam tema tertentu.

13 mitra MAMPU mengikuti rangkaian acara ini, yaitu 'Aisyiyah, BaKTI, BITRA, FPL, KAPAL Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Komnas Perempuan, Migrant Care, PEKKA, PERMAMPU, TURC, Yasanti, dan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). Setelah mengikuti DEVI Speed Date, mitra MAMPU diharapkan terinspirasi dalam penggunaan data untuk pengambilan keputusan lembaga dan advokasi; berjejaring dengan lembaga-lembaga lain yang melakukan riset, publikasi, maupun pengolahan data untuk mendukung advokasi isu-isu terkait; serta terdorong untuk bertukar informasi dan berkolaborasi dalam isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Konsolidasi KPPI untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan

“Tiada demokrasi sejati tanpa keterwakilan perempuan,” begitu tegas Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan saat membuka Konsolidasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Jakarta pada 28 November lalu. “Perempuan berperan penting dalam akselerasi sumber daya manusia yang potensial. Untuk itu, konsolidasi KPPI diperlukan untuk meningkatkan pembangunan manusia Indonesia melalui terwujudnya keterwakilan 30% perempuan di parlemen pada 2024,” tandasnya.

Salah satu perwakilan Mitra MAMPU yang berpartisipasi dalam KPPI adalah Dian Kartika Sari dari Koalisi Perempuan Indonesia. Berbicara pada sesi utama, Dian mengatakan bahwa anggota legislatif perempuan harus menggalang investasi politik dan sosial seperti penguatan perspektif keberpihakan para perempuan terhadap persoalan-persoalan yang erat kaitannya dengan isu perempuan dan kesetaraan. “Tema-tema yang dikerjakan oleh

Program MAMPU dapat digunakan sebagai isu yang diperjuangkan oleh perempuan di kancah politik untuk menjangkau para konstituen”, pungkash Dian.



Saat ini perempuan hanya menempati 20,5 % kursi di DPR atau 119 kursi dari total 575 kursi di DPR. KPPI adalah organisasi perempuan pegiat politik yang didirikan tahun 2000 dengan pengurus berasal dari seluruh partai politik peserta pemilu. KPPI ingin memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia mengarah pada upaya pemenuhan, perlindungan, dan pemberian jaminan hak-hak perempuan, termasuk dalam bidang politik, sebagai hak asasi yang harus dipenuhi negara.

Pemerintah Daerah sebagai Ujung Tombak Migrasi Aman di Lombok Tengah



Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk melakukan transformasi tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran melalui revisi UU No. 39/ 2004 tentang Penempatan dan

Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi UU No. 18/ 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Namun, perubahan kebijakan tata kelola pekerja migran di tingkat nasional harus diiringi dengan inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan harmonisasi kebijakan. Hal inilah yang mendasari Migrant Care, Mitra MAMPU untuk program perlindungan pekerja migran, mengadakan seminar dan lokakarya bertajuk “Sosialisasi UU No.18/ 2017 tentang Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia dan Penjaringan Masukan Substansi Aturan Pelaksana UU PPMI” di Mataram, NTB, 12 November lalu.

Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 60 orang yang terdiri dari Kemenaker, Pemda, OMS, komunitas pekerja migran, akademisi hingga aparat penegak hukum menghasilkan rekomendasi berupa kesepakatan tentang peran pemerintah provinsi, kabupaten/ kota dan desa dalam perlindungan pekerja migran. Konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah baik dari segi kebijakan dan sistem tata kelola perlindungan adalah sangat krusial dalam implementasi UU PPMI. Beberapa rekomendasi penting dari lokakarya ini adalah: 1) Sosialisasi UU dan informasi tentang migrasi aman hingga ke desa-desa; 2) Membentuk satgas dan layanan terpadu satu pintu bagi calon pekerja migran; 3) Mendorong revisi peraturan daerah terkait dengan pekerja migran; dan 4) Pembaruan data pekerja migran.

Jaringan Pekerja Rumahan Jawa Timur Konsolidasi Rencana Kerja 2020

27 pengurus Jaringan Perempuan Pekerja Rumahan Indonesia (JPPRI) dari enam kabupaten/kota di Jawa Timur melakukan rapat konsolidasi di Malang pada 9 Desember lalu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi kinerja JPPRI tahun 2019, ajang berbagi perkembangan program masing-masing wilayah, serta membahas rencana kerja JPPRI Jawa Timur 2020.

“Sepanjang tahun ini kami merasa terbantu dengan pendampingan dari Program MAMPU, terutama dengan adanya pelatihan penggunaan komputer. Kini kami bisa membuat laporan dengan lebih sistematis, terutama sekali dalam pengarsipan dan penyimpanan data,” jelas Wuwun dari JPPRI Provinsi Jawa Timur.

Rapat konsolidasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan membantu JPPRI Jatim menjadi organisasi yang mandiri selepas didampingi oleh MAMPU pada pertengahan 2020 nanti.

Di tahun 2020, JPPRI Jatim merencanakan untuk membangkitkan kembali kegiatan Sekolah Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR), melakukan penataan organisasi dan advokasi yang lebih baik, serta revitalisasi Koperasi Bangkit Sejahtera Abadi (BSA). Sejalan dengan itu, Program MAMPU juga akan meningkatkan kapasitas anggota JPPRI Jatim dalam kewirausahaan yakni pelatihan pemasaran dan survei pasar.

Tentang MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Program ini mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan, sehingga akses perempuan terhadap pelayanan dasar dan program pemerintah meningkat.

Informasi Lebih Lanjut:
Website: www.mampu.or.id
Twitter : @ProgramMAMPU
Email : info@mampu.or.id